

**FOKUS, RENCANA PENERIMAAN, DAN RENCANA PENYELESAIAN
 KEGIATAN PEMERIKSAAN TAHUN 2011**

KANTOR WILAYAH DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam yaitu:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	c. 53200 Perdagangan Ekspor bahan baku Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembaku
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 67.693.746.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Banda Aceh	11	10	110
2	KPP Pratama Lhokseumawe	9	10	90
3	KPP Pratama Meulaboh	5	10	50
4	KPP Pratama Bireuen	5	10	50
5	KPP Pratama Langsa	6	10	60
6	KPP Pratama Tapaktuan	4	10	40
7	KPP Pratama Subulussalam	5	10	50
Jumlah		45		450

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 15100 Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak, dan lemak
	c. 25000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 126.645.725.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Madya Medan	27	8	216
2	KPP Pratama Medan Barat	13	10	130
3	KPP Pratama Binjai	9	10	90
4	KPP Pratama Medan Polonia	14	10	140
5	KPP Pratama Medan Timur	11	10	110
6	KPP Pratama Medan Kota	11	10	110
7	KPP Pratama Medan Belawan	14	10	140
8	KPP Pratama Medan Petisah	12	10	120
9	KPP Pratama Lubuk Pakam	12	10	120
Jumlah		123		1.176

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yaitu:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 15140 Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewan
	c. 15300 Industri Penggilingan Padi-padian, Tepung, dan Makanan Ternak
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 42.308.965.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Tebing Tinggi	7	10	70
2	KPP Pratama Pematang Siantar	11	10	110
3	KPP Pratama Kisaran	9	10	90
4	KPP Pratama Kabanjahe	6	10	60
5	KPP Pratama Balige	4	10	40
6	KPP Pratama Sibolga	5	10	50
7	KPP Pratama Padang Sidempuan	7	10	70
8	KPP Pratama Rantau Prapat	7	10	70
Jumlah		56		560

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau yaitu:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 25000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
	c. 28100 Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, pembuatan tangki, dan generator uap
	d. 55100 Penyediaan Akomodasi

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 192.011.390.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	15	10	150
2	KPP Pratama Dumai	7	10	70
3	KPP Pratama Rengat	8	10	80
4	KPP Pratama Tanjung Pinang	8	10	80
5	KPP Pratama Balam	15	10	150
6	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	12	10	120
7	KPP Madya Batam	19	8	152
8	KPP Madya Pekanbaru	20	8	160
9	KPP Madya Pekanbaru	8	10	80
10	KPP Pratama Pekanbaru	7	10	70
11	KPP Bengkalis	8	10	80
12	KPP Pratama Bangkinang	6	10	60
13	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	7	10	70
	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun			
	KPP Pratama Bintan			
Jumlah		140		1.322

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi yaitu:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 15100 Pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak, dan lemak
	c. 25100 Industri karet dan barang dari karet
	d. 65000 Perantara Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana Pensiun

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 100.712.995.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Padang	15	10	150
2	KPP Pratama Bukittinggi	7	10	70
3	KPP Pratama Salak	7	10	70
4	KPP Pratama Payakumbuh	7	10	70
5	KPP Pratama Jambi	15	10	150
6	KPP Pratama Muara Bungo	8	10	80
7	KPP Pratama Kuala Tungkal	7	10	70
8	KPP Pratama Bangko	6	10	60
Jumlah		72		720

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEP. BANGKA BELITUNG

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yaitu:
	a. 01100 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
	b. 10000 Pertambangan Batubara, Penggalan Gambut, Gasifikasi Batubara, dan Pembuatan Briket Batubara
	c. 13200 Pertambangan Logam dan Biji Timah
	d. 25100 Industri Karet dan Barang dari Karet

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 133.173.485.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Palembang Ilir	15	10	150
2	Timur KPP Pratama Palembang Ilir	15	10	150
3	Barat KPP Pratama Palembang	7	10	70
4	Seberang Ulu	7	10	70
5	KPP Pratama Sekayu	6	10	60
6	KPP Pratama Kayu Agung	6	10	60
7	KPP Pratama Baturaja	8	10	80
8	KPP Pratama Prabumulih	7	10	70
9	KPP Pratama Lubuk Linggau	4	10	40
10	KPP Pratama Lahat	9	10	90
11	KPP Pratama Pangkalpinang	8	10	80
12	KPP Pratama Bangka	6	10	60
13	KPP Pratama Tanjung Pandan	24	8	192
	KPP Madya Palembang			
Jumlah		122		1.172

KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung yaitu:
	a. 01000 Pertanian dan Perburuan
	b. 12000 Pertambangan Biji Uranium dan Thorium
	c. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	d. 21000 Industri dari Kertas, Barang dari Kertas, dan Sejenisnya

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 87.017.998.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Kotabumi	9	10	90
2	KPP Pratama Kedaton	10	10	100
3	KPP Pratama Natar	8	10	80
4	KPP Pratama Curup	5	10	50
5	KPP Pratama	5	10	50
6	Argamakmur	12	10	120
7	KPP Pratama Tanjung	8	10	80
8	Karang KPP Pratama	8	10	80
9	Metro	10	10	100
	KPP Pratama Teluk Betung KPP Pratama Bengkulu			
Jumlah		75		750

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat yaitu:
	a. 01000 Pertanian dan Perburuan
	b. 10000 Pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara
	c. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	d. 67000 Jasa penunjang perantara keuangan

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 521.564.256.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	10	10	100
2	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	12	10	120
3	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	12	10	120
4	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	12	10	120
5	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	12	10	120
6	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	11	10	110
7	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	15	10	150
8	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	11	10	110
9	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	9	10	90
10	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	11	10	110
11	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	10	10	100
12	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	13	10	130
13	KPP Pratama Jakarta Senen	11	10	110
14	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang	12	10	120
15	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	15	10	150
16	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	31	8	248
	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga			
	KPP Madya Jakarta Pusat			
	Jumlah	207		2.008

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat yaitu:
	a. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	b. 55000 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
	c. 63000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata
	d. 71000 Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya, Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 228.709.756.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Palmerah	14	10	140
2	KPP Pratama Jakarta Tamansari	15	10	150
3	Satu	12	10	120
4	KPP Pratama Jakarta Tambora	12	10	120
5	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	12	10	120
6	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	15	10	150
7	KPP Pratama Jakarta Grogol	10	10	100
8	Petamburan KPP Pratama Jakarta	28	8	224
9	Tamansari Dua	10	10	100
10	KPP Madya Jakarta Barat	9	10	90
11	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua KPP Pratama Jakarta Kalideres KPP Pratama Jakarta Kemangan	11	10	110
Jumlah		148		1.424

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan yaitu:
	a. 10100 Pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara
	b. 74000 Jasa Perusahaan Lainnya
	c. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	d. 66000 Asuransi dan dana pensiun

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 575.770.449.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	14	10	140
2	KPP Pratama Jakarta Cilandak	12	10	120
3	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	14	10	140
4	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	9	10	90
5	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	15	10	150
6	KPP Madya Jakarta Selatan	31	8	248
7	KPP Pratama Jakarta Mampang	15	10	150
8	Prapatan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	14	10	140
9	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	14	10	140
10	KPP Pratama Jakarta Pancoran	12	10	120
11	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	14	10	140
12	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	14	10	140
13	KPP Pratama Jakarta Tebet	14	10	140
Jumlah		193		1.868

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yaitu:
	a. 27000 Industri Logam Dasar
	b. 52000 Perdagangan eceran, kecuali mobil dan sepeda motor, reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga
	c. 67000 Jasa Penunjang Perantara Keuangan

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 150.669.274.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Matraman	10	10	100
2	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	14	10	140
3	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	14	10	140
4	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	12	10	120
5	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	13	10	130
6	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	11	10	110
7	KPP Madya Jakarta Timur	27	8	216
8	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	10	10	100
9	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	15	10	150
Jumlah		126		1.206

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara yaitu:
	a. 15000 Industri makanan dan minuman
	b. 63000 Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata
	c. 35000 Industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih
	d. 67000 Jasa penunjang perantara keuangan

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 202.129.268.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	11	10	110
2	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	15	10	150
3	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	15	10	150
4	KPP Pratama Jakarta Pademangan	12	10	120
5	KPP Pratama Jakarta Koja	13	10	130
6	KPP Madya Jakarta Utara	28	8	224
7	KPP Pratama Jakarta Pluit	14	10	140
8	KPP Pratama Jakarta Sunter	15	10	150
Jumlah		123		1.174

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yaitu:
	a. Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing
	b. Perusahaan grup
	c. 25000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
	d. 67100 Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali asuransi dan Dana Pensiun (Pasar Modal)

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 1.604.048.276.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Penanaman Modal Asing Satu	44	8	352
2	KPP Penanaman Modal Asing Dua	45	8	360
3	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	30	8	240
4	KPP Penanaman Modal Asing Empat	44	8	352
5	KPP Penanaman Modal Asing Lima	28	8	224
6	KPP Penanaman Modal Asing Enam	28	8	224
7	KPP Perusahaan Masuk Bursa	30	8	240
8	KPP Badan dan Orang Asing Satu	21	10	210
9	KPP Badan dan Orang Asing Dua	20	10	200
Jumlah		290		2.402

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yaitu:
	a. 15400 Industri Makanan Lainnya
	b. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	c. 55100 Penyediaan Akomodasi
	d. 65100 Perantara Moneter (Perbankan)

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 226.525.451.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Sukabumi	12	10	120
2	KPP Pratama Cianjur	9	10	90
3	KPP Pratama Purwakarta	9	10	90
4	KPP Pratama Cimahi	15	10	150
5	KPP Pratama Bandung	12	10	120
6	Tegallega KPP Pratama	17	10	170
7	Bandung Cibeunying	14	10	140
8	KPP Pratama Bandung	11	10	110
9	Karees KPP Pratama	18	10	180
10	Tasikmalaya	11	10	110
11	KPP Pratama Bandung	28	8	224
12	Bojonagara KPP Pratama Bandung	10	10	100
13	Cicadas KPP Madya	10	10	100
14	Bandung	9	10	90
15	KPP Pratama Ciamis	12	10	120
16	KPP Pratama Garut	9	10	90
	KPP Pratama Majalaya			
	KPP Pratama Soreang			
	KPP Pratama Sumedang			
Jumlah		206		2.004

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II yaitu:
	a. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	b. 25000 Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik
	c. 29000 Industri Mesin dan perlengkapannya
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 352.112.392.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Madya	32	8	256
2	Bekasi	19	10	190
3	KPP Pratama Bekasi	21	10	210
4	Utara	12	10	120
5	KPP Pratama Bekasi	14	10	140
6	Selatan KPP Pratama	12	10	120
7	Cibitung	14	10	140
8	KPP Pratama Cikarang	10	10	100
9	Selatan	15	10	150
10	KPP Pratama Cikarang	16	10	160
11	Utara KPP Pratama	14	10	140
12	Karawang Utara KPP	15	10	150
13	Pratama Karawang	11	10	110
14	Selatan KPP Pratama	10	10	100
15	Cirebon KPP	9	10	90
16	Pratama Depok	9	10	90
17	KPP Pratama Bogor	10	10	100
	KPP Pratama Cibinong			
	KPP Pratama Cileungsi			
	KPP Pratama Ciawi			
	KPP Pratama Indramayu			
	KPP Pratama Kuningan			
	KPP Pratama Subang			
Jumlah		243		2.366

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Banten yaitu:
	a. 21000 Industri makanan dan minuman
	b. 15000 Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

R p 254.878.315.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Madya Tangerang	24	8	192
2	KPP Pratama Tangerang Timur	14	10	140
3	KPP Pratama Kosambi	11	10	110
4	KPP Pratama Tigaraksa	17	10	170
5	KPP Pratama Pandeglang	8	10	80
6	KPP Pratama Serpong	20	10	200
7	KPP Pratama Cilegon	12	10	120
8	KPP Pratama Serang	15	10	150
9	KPP Pratama Tangerang Barat	14	10	140
Jumlah		135		1.302

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I yaitu:
	a. 16000 Industri pengolahan tembakau
	b. 18100 Industri pakaian jadi dari tekstil, kecuali pakaian jadi berbulu
	c. 36100 Industri furnitur

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 111.791.297.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Tegal	12	10	120
2	KPP Pratama Pekalongan	11	10	110
3	KPP Pratama Semarang Barat	15	10	150
4	KPP Pratama Semarang Timur	12	10	120
5	KPP Pratama Salatiga	12	10	120
6	KPP Pratama Kudus	11	10	110
7	KPP Pratama Pati	12	10	120
8	KPP Pratama Semarang Selatan	12	10	120
9	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	12	10	120
10	KPP Madya Semarang	28	8	224
11	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	11	10	110
12	KPP Pratama Batang	11	10	110
13	KPP Pratama Blora	10	10	100
14	KPP Pratama Demak	10	10	100
15	KPP Pratama Jepara	10	10	100
16	KPP Pratama Semarang Candisari	11	10	110
17	KPP Pratama Semarang Gayamsari	12	10	120
Jumlah		212		2.064

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yaitu:
	a. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	b. 16000 Industri pengolahan tembakau
	c. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	d. 85000 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 64.866.119.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Purwokerto	12	10	120
2	KPP Pratama Cilacap	12	10	120
3	KPP Pratama Kebumeh	8	10	80
4	KPP Pratama Magelang	12	10	120
5	KPP Pratama Klaten	11	10	110
6	KPP Pratama Surakarta	17	10	170
7	KPP Pratama Boyolali	8	10	80
8	KPP Pratama Karanganyar	12	10	120
9	KPP Pratama Purbalingga	10	10	100
10	KPP Pratama Purworejo	8	10	80
11	KPP Pratama Sukoharjo	15	10	150
12	KPP Pratama Temanggung	10	10	100
Jumlah		135		1.350

KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:
	a. 01200 Peternakan
	b. 16000 Industri Pengolahan Tembakau
	c. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	d. 55100 Penyediaan Akomodasi

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

R p 32.209.531.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Yogyakarta	14	10	140
2	KPP Pratama Sleman	15	10	150
3	KPP Pratama Bantul	12	10	120
4	KPP Pratama Wates	8	10	80
5	KPP Pratama Wonosari	8	10	80
Jumlah		57		570

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yaitu:
	a. 21000 Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya
	b. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	c. 63510 Jasa Pengurusan Transportasi
	d. 65100 Perantara Moneter (Perbankan)

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 221.925.320.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Surabaya Suko manunggal	13	10	130
2	KPP Pratama Surabaya Krem bangan	18	10	180
3	KPP Pratama Surabaya Gubeng	18	10	180
4	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	11	10	110
5	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	17	10	170
6	KPP Pratama Surabaya Genteng	15	10	150
7	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	15	10	150
8	KPP Pratama Surabaya Sawahan	15	10	150
9	KPP Pratama Surabaya Rungkut	15	10	150
10	KPP Pratama Surabaya Sim okerto	12	10	120
11	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	12	10	120
12	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	12	10	120
13	KPP Madya Surabaya	26	8	208
Jumlah		199		1.938

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yaitu:
	a. 15000 Industri Makanan dan Minuman
	b. 27000 Industri Logam dasar
	c. 36000 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan lainnya
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 155.701.700.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Bojonegoro	8	10	80
2	KPP Pratama Mojokerto	18	10	180
3	KPP Pratama Sidoarjo Barat	15	10	150
4	KPP Pratama Pamekasan	10	10	100
5	KPP Pratama Gresik Utara	15	10	150
6	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	13	10	130
7	KPP Pratama Madiun	12	10	120
8	KPP Madya Sidoarjo	32	8	256
9	KPP Pratama Gresik Selatan	13	10	130
10	KPP Pratama Sidoarjo Utara	15	10	150
11	KPP Pratama Bangkalan	8	10	80
12	KPP Pratama Lamongan	8	10	80
13	KPP Pratama Ngawi	8	10	80
14	KPP Pratama Ponorogo	8	10	80
15	KPP Pratama Tuban	9	10	90
Jumlah		192		1.856

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yaitu:
	a. 01000 Pertanian dan perburuan
	b. 15000 Industri makanan dan minuman
	c. 16000 Industri pengolahan tembakau
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 106.457.221.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Blitar	10	10	100
2	KPP Pratama Pare	10	10	100
3	KPP Pratama Situbondo	8	10	80
4	KPP Pratama Singosari	12	10	120
5	KPP Pratama Probolinggo	15	10	150
6	KPP Pratama Tulungagung	10	10	100
7	KPP Madya Malang	29	8	232
8	KPP Pratama Kepanjen	12	10	120
9	KPP Pratama Kediri	12	10	120
10	KPP Pratama Jember	12	10	120
11	KPP Pratama Banyuwangi	10	10	100
12	KPP Pratama Malang Utara	15	10	150
13	KPP Pratama Malang Selatan	15	10	150
14	KPP Pratama Pasuruan	13	10	130
15	KPP Pratama Batu	10	10	100
Jumlah		193		1.872

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat yaitu:
	a. 01000 Pertanian dan perburuan
	b. 20000 Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur), dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya
	c. 25000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik
	d. 40000 Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 51.263.339.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Pontianak	14	10	140
2	KPP Pratama Singkawang	11	10	110
3	KPP Pratama Ketapang	8	10	80
4	KPP Pratama Mempawah	9	10	90
5	KPP Pratama Sanggau	6	10	60
6	KPP Pratama Sintang	6	10	60
Jumlah		54		540

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu:
	a. 01100 Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura
	b. 10100 Pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara
	c. 65100 Perantara Moneter (Perbankan)

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 101.719.889.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Banjarmasin	16	10	160
2	KPP Pratama Banjarbaru	15	10	150
3	KPP Pratama Barabai	8	10	80
4	KPP Pratama Batulicin	10	10	100
5	KPP Pratama Tanjung	8	10	80
6	KPP Pratama Palangka Raya	13	10	130
7	KPP Pratama Sampit	13	10	130
8	KPP Pratama Pangkalan Bun	8	10	80
9	KPP Pratama Muara Teweh	6	10	60
Jumlah		97		970

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur yaitu:
	a. 01100 Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura
	b. 10100 Pertambangan batubara, penggalan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara
	c. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	d. 15140 Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewan

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 213.500.440.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Balikpapan	17	10	170
2	KPP Pratama Samarinda	15	10	150
3	KPP Pratama Tarakan	9	10	90
4	KPP Pratama Bontang	11	10	110
5	KPP Madya Balikpapan	27	8	216
6	KPP Pratama Penajam	8	10	80
7	KPP Pratama Tanjung Redeb	6	10	60
8	KPP Pratama Tenggarong	10	10	100
Jumlah		103		976

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yaitu:
	a. 01100 Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura
	b. 15120 Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya
	c. 36910 Industri Barang Perhiasan
	d. 52320 Perdagangan Eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi di dalam bangunan

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 123.713.196.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Madya Makassar	29	8	232
2	KPP Pratama Makassar Utara	16	10	160
3	KPP Pratama Makassar Selatan	15	10	150
4	KPP Pratama Makassar Barat	15	10	150
5	KPP Pratama Maros	8	10	80
6	KPP Pratama Bantaeng	6	10	60
7	KPP Pratama Bulukumba	6	10	60
8	KPP Pratama Watampone	8	10	80
9	KPP Pratama Palopo	12	10	120
10	KPP Pratama Parepare	10	10	100
11	KPP Pratama Mamuju	6	10	60
12	KPP Pratama Majene	4	10	40
13	KPP Pratama Kendari	10	10	100
14	KPP Pratama Kolaka	4	10	40
15	KPP Pratama Bau-Bau	6	10	60
Jumlah		155		1.492

KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yaitu:
	a. 05000 Perikanan
	b. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	c. 53000 Perdagangan Ekspor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor
	d. 63000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 62.477.047.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Manado	15	10	150
2	KPP Pratama Bitung	10	10	100
3	KPP Pratama Kotamobagu	5	10	50
4	KPP Pratama Tahuna	4	10	40
5	KPP Pratama Gorontalo	9	10	90
6	KPP Pratama Palu	13	10	130
7	KPP Pratama Luwuk	8	10	80
8	KPP Pratama Poso	5	10	50
9	KPP Pratama Tali-Tali	4	10	40
10	KPP Pratama Ternate	9	10	90
11	KPP Pratama Tobelo	4	10	40
Jumlah		86		860

KANTOR WILAYAH DJP BALI

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Bali yaitu :
	a. 15100 Industri makanan dan minuman
	b. 55100 Penyediaan Akomodasi
	c. 63000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata
	d. 65100 Perantara Moneter (Perbankan)

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 83.663.469.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Denpasar	15	10	150
2	Barat KPP Pratama	10	10	100
3	Singaraja	15	10	150
4	KPP Pratama Denpasar	28	8	224
5	Timur KPP Madya	15	10	150
6	Denpasar	11	10	110
7	KPP Pratama Badung	10	10	100
8	Selatan KPP Pratama Badung Utara KPP Pratama Gianyar KPP Pratama Tabanan	10	10	100
Jumlah		114		1.084

KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara yaitu:
	a. 05000 Perikanan
	b. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga
	c. 63000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata
	d. 65000 Perantara keuangan kecuali asuransi dan dana pensiun

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 41.190.350.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Mataram Barat	14	10	140
2	KPP Pratama Mataram Timur	13	10	130
3	KPP Pratama Praya	10	10	100
4	KPP Pratama Sumbawa Besar	7	10	70
5	KPP Pratama Raba Bima	10	10	100
6	KPP Pratama Kupang	9	10	90
7	KPP Pratama Atambua	4	10	40
8	KPP Pratama Waingapu	3	10	30
9	KPP Pratama Maumere	6	10	60
10	KPP Pratama Ende	4	10	40
11	KPP Pratama Ruteng	3	10	30
Jumlah		83		830

KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Papua Maluku yaitu:
	a. 01000 Pertanian dan Perburuan
	b. 02000 Kehutanan
	c. 13200 Pertambangan Logam dan Bijih Timah
	d. 52000 Perdagangan Eceran, kecuali mobil dan sepeda motor; Reparasi Keperluan Barang-Barang Pribadi dan Rumah Tangga

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 85.047.984.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Pratama Jayapura	14	10	140
2	KPP Pratama Merauke	6	10	60
3	KPP Pratama Timika	7	10	70
4	KPP Pratama Biak	6	10	60
5	KPP Pratama Sorong	7	10	70
6	KPP Pratama Manokwari	6	10	60
7	KPP Pratama Ambon	11	10	110
Jumlah		57		570

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar yaitu :
	a. Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing
	b. Perusahaan grup
	c. 91110 Organisasi Bisnis dan Pengusaha
	d. 95004 Pegawai Swasta

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 2.530.217.755.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KPP Wajib Pajak Besar Satu	37	4	148
2	KPP Wajib Pajak Besar Dua	35	4	140
3	KPP BUMN	29	7	203
4	KPP WP Besar Orang Pribadi (HWI)	21	4	84
Jumlah		122		575

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

A. FOKUS PEMERIKSAAN

No	Fokus Pemeriksaan
1	Sesuai Fokus Pemeriksaan Nasional
2	Sesuai Kekhususan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yaitu:
	a. Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing
	b. Kasus tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
	c. Perusahaan grup

B. RENCANA PENERIMAAN PEMERIKSAAN

Rp 148.283.602.000,00

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

No	Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)	Jumlah Pemeriksa Pajak	Standar Prestasi Minimal Pemeriksa	Rencana Penyelesaian Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan a. Fungsional Pemeriksa Dit. P2 b. Tim Optimisasi Penerimaan Negara	14 69	4	56 137
Jumlah		83		193



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nom or :
 Sifat : Segera
 Lam piran : -
 Hal : Usul Relokasi Fungsional Pemeriksa Pajak (bersifat ad hoc)

Yth.
 (2)

Dalam rangka manajemen penyelesaian pemeriksaan dan meningkatkan efektivitas kinerja pemeriksaan, dengan ini kami mengusulkan pemindahan fungsional Pemeriksa yang bersifat bantuan sementara (ad hoc) sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Asal	Unit Baru	Jangka Waktu Relokasi
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

dengan alasan(10).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor

.....
 NIP(11)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- Angka (3) : Cukup jelas
- Angka (4) : Diisi dengan nama fungsional Pemeriksa yang diusulkan untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (5) : Diisi dengan NIP fungsional Pemeriksa yang diusulkan untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan fungsional Pemeriksa yang diusulkan untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (7) : Diisi dengan unit penugasan asal sebelum fungsional Pemeriksa direlokasi.
- Angka (8) : Diisi dengan unit penugasan dimana fungsional Pemeriksa diusulkan akan direlokasi.
- Angka (9) : Diisi dengan jangka waktu penugasan bantuan sementara.
- Angka (10) : Diisi dengan alasan diusulkannya relokasi fungsional pemeriksa.
- Angka (11) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN**

Nom or :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan/Penolakan*) Relokasi Fungsional Pemeriksa Pajak (bersifat ad hoc)

Yth.
..... (1)

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: tanggal(2), dengan ini disampaikan bahwa fungsional Pemeriksa berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Asal	Unit Baru	Jangka Waktu Relokasi
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

disetujui/ditolak*) untuk direlokasi unit penugasannya dengan alasan efektivitas kinerja pemeriksaan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur

.....
NIP(10)

Tembusan:
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak diperlukan

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Kepala Kanwil DJP pengusul.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Diisi dengan nama fungsional Pemeriksa yang disetujui/ditolak untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (5) : Diisi dengan NIP fungsional Pemeriksa yang disetujui/ditolak untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan fungsional Pemeriksa yang disetujui/ditolak untuk direlokasi unit penugasannya.
- Angka (7) : Diisi dengan unit penugasan asal sebelum fungsional Pemeriksa direlokasi.
- Angka (8) : Diisi dengan unit penugasan dimana fungsional Pemeriksa diusulkan akan direlokasi.
- Angka (9) : Diisi dengan jangka waktu penugasan bantuan sementara.
- Angka (10) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.

DAFTAR PERSEDIAAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN RUTIN
 KPP
 Bulan 2011

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NPWP	JENIS SPT		TAHUN PAJAK MASA PAJAK	SIAIUSPT					KETERANGAN
			SPT TAHUNAN PPh	SPT MASA PPh		LEBIHBAYAR RESITUSI	LEBIHBAYAR KOMPENSASI	RUGI TIDAK LEBIHBAYAR (RILB)	WOP YANG AKAN MENINGGALKAN INDONESIA	VP/BAJAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN PELEBURAN PEMECAHAN PENGAMBILAHAN ATAU PENUTUPAN USAHA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) : Cukup jelas;
Kolom (2) : Cukup jelas;
Kolom (3) : Cukup jelas;
Kolom (4) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (5) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (6) : Di isi dengan tahun pajak yang akan diperiksa untuk SPT Tahunan PPh badan/orang pribadi atau Masa Pajak yang akan diperiksa untuk SPT Masa PPN
Kolom (7) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (8) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (9) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (10) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (11) : Di isi dengan tanda check list (√) untuk menentukan status SPT;
Kolom (12) : Di isi apabila sudah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2 dengan keterangan "sudah terbit SP2" dan ditambahkan tanggal jatuh tempo penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak (apabila status SPT lebih bayar restitusi);



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nom or :
Sifat : Segera
Hal : Pembentukan Satgas Pemeriksaan

Yth.
..... (2)

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- /PJ/2011 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011, bersama ini disampaikan daftar anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan untuk didaftarkan atau dinonaktifkan pada Modul Pemeriksaan.

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Dalam Tim Pemeriksa	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

.....
NIP(11)

Tem busan:
..... (9)

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Diisi dengan nama dan NIP pegawai yang didaftarkan/dinonaktifkan sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan.
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang didaftarkan/dinonaktifkan sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan pegawai yang didaftarkan/dinonaktifkan sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan dalam susunan tim Pemeriksa Pajak (Ketua Tim atau Anggota Tim)
- Angka (7) : Diisi dengan:
- "Didaftarkan" untuk pegawai yang didaftarkan sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan
 - "Dinonaktifkan" untuk pegawai yang tidak lagi termasuk sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan
- Angka (8) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (9) : Diisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah atasan.